



## Respon Masyarakat Terhadap Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

### *Community Response to Land and Building Taxpayers*

Jenda Ingan Mahuli<sup>1\*</sup>, Ali Mukti Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

*Corresponding author\**: [jendainganmahuliketaren1208@gmail.com](mailto:jendainganmahuliketaren1208@gmail.com)

#### Abstrak

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Metode penelitian Survey. Sedangkan objek penelitiannya adalah masyarakat kelurahan timbang deli kecamatan Medan Amplas Medan Sumatera utara. Adapun hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan data mengenai seluruh jawaban responden terhadap respon masyarakat terhadap wajib pajak PBB era otonomi daerah pada Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas untuk responden saat ini, ternyata dari 50 orang yang diteliti: 4 orang (8%) merespon sangat rendah, 8 orang (16%) yang merespon rendah, 16 orang (32%) yang merespon biasa-biasa saja, 21 orang (42%) yang merespon tinggi, dan 1 orang (2%) yang merespon sangat tinggi. Dari hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan respon masyarakat terhadap wajib pajak PBB era otonomi daerah pada Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas berdasarkan responden saat ini adalah "tinggi". Meskipun demikian, masih ada kesenjangan antara nilai total respon masyarakat dengan hasil masing-masing kuesioner, khususnya berkaitan dengan keterlibatan membayar pajak PBB dan ketepatan waktu pembayaran. Hal itu menunjukkan bahwa respon masyarakat yang tinggi tidak berjalan searah dengan keterlibatan mereka dan ketepatan waktu pembayaran PBB mereka. Artinya, respon yang tinggi tidak diikuti oleh kesadaran pajak yang tinggi pula.

**Kata Kunci:** Respon; Masyarakat; Wajib Pajak; Bumi Dan Bangunan.

#### Abstract

*The research method used in this writing is the survey research method. While the object of research is the community of the weighing deli sub-district of Medan Amplas Medan, North Sumatra. The results of this study are Based on data regarding all respondents' answers to the community's response to PBB taxpayers in the era of regional autonomy in Timbang Deli Village, Medan Amplas District for current respondents, it turns out that from 50 people studied: 4 people (8%) responded very low, 8 people (16%) responded low, 16 people (32%) responded mediocre, 21 people (42%) responded high, and 1 person (2%) responded very highly. From these results, it can be concluded that the overall public response to PBB taxpayers in the era of regional autonomy in Timbang Deli Village, Medan Amplas District based on current respondents is "high". However, there is still a gap between the total value of community responses and the results of each questionnaire, especially with regard to the involvement in paying PBB taxes and the timeliness of payments. This shows that the high community response does not go hand in hand with their involvement and the timeliness of their PBB payments. That is, a high response is not followed by a high tax awareness as well.*

**Keywords:** Response; Public; Taxpayer; Earth And Building.

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985, wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah Tingkat II dilimpahkan kepada Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk. Pelimpahan wewenang tersebut hanya meliputi Sektor Perkotaan dan Perdesaan, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Lebih jauh, masyarakat sebagai wajib pajak, jika dalam disiplin ilmu manajemen merupakan konsumen akhir (end user) sebagai objek tetap kegiatan pajak di suatu daerah. Kelangsungan pembangunan di suatu daerah adalah tergantung dari peran serta masyarakat dalam kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah, salah satunya adalah program wajib pajak. Membayar pajak, berarti telah berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di daerahnya. Karena dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembangunannya secara bertahap untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan adanya kenyataan tentang otonomi daerah di atas, dan tentang pentingnya peran masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak untuk mendukung program pemerintah, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Metode penelitian Survey. menurut Sugiyono (2013: 11) penelitian survey berarti penelitian terhadap populasi besar atau kecil dengan mempelajari sampel data yang berasal dari populasi. Tujuannya adalah untuk menghadirkan kejadian yang relatif, distribusi, dan berkaitan erat antar variabel psikologis dan juga sosiologis. Sedangkan objek penelitiannya adalah masyarakat kelurahan timbang deli kecamatan Medan amplas Medan Sumatera utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada umumnya setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan dikenai kewajiban membayar pajak. Surat tagihan pajak atau bukti pembayaran PBB adalah semata-mata untuk perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status atau hak pemilikan atas tanah / bangunan tersebut.

Contoh penentuan biaya PBB:

Pak Jenda memiliki sebuah rumah di kawasan Medan dengan luas tanah 800 m<sup>2</sup>. NJOP-nya Rp.160.000.000,00, luas bangunan seluas 400m<sup>2</sup>, dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya Rp.90.000.000,00 PBB tahun 2006 untuk tanah dan bangunan tersebut.

Perhitungan:

Luas tanah = 800 m<sup>2</sup>, NJOP = Rp.160.000.000,00 atau NJOP / m<sup>2</sup>=Rp.200.000

Luas bangunan = 400 m<sup>2</sup>, NJOP = Rp.90.000.000,00 atau NJOP / m<sup>2</sup> = Rp.225.000

Perhitungan PBB tahun 2006 :	
NJOP Tanah = 800 x Rp.200.000	= Rp.160.000.000
NJOP Bangunan = 400 x Rp.225.000	= Rp. 90.000.000
NJOP Tanah dan Bangunan	= Rp.250.000.000
NJOP TKP	= Rp. 12.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB	= Rp.238.000.000
NJKP = 20% X Rp.238.000.000	= Rp. 47.600.000
PBB = 0,5% x Rp.47.600.000	= Rp. 238.000

Dalam penelitian ini angket yang disebar sebanyak 50 angket. Semua angket yang disebar tersebut dapat terkumpul seluruhnya. Jadi angket yang dianggap sah untuk diolah berjumlah 50 angket (100%).

Di bawah ini ditampilkan tabel tentang historis pelaksanaan dari upaya pengumpulan data melalui kuesioner yang telah dirancang menjadi bahan analisis pada penelitian.

Tabel 1 Distribusi kuesioner dan Pengumpulan data

Jumlah responden terpilih melalui random sampling	: 50
Jumlah angket disebar	: 50
Jumlah angket dikembalikan	: 50
Total angket diterima kembali dari seluruh responden	: 100%
Akurasi pengisian kuesioner oleh responden	: 100%
Kendala yg bermakna di dalam proses pengumpulan data	: Nihil

Kemudian, di bawah ini adalah data responden secara lengkap.

Tabel 2 Identitas Responden ( n = 50)

NO.	URAIAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
<b>1.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		
	- Laki-Laki	<b>29</b>	<b>58</b>
	- Perempuan	<b>21</b>	<b>42</b>
<b>2.</b>	<b>Umur</b>		
	<b>20-25 tahun</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
	<b>26 - 30 tahun</b>	<b>32</b>	<b>64</b>
	<b>31 - 40 tahun</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
	<b>&gt; 40 tahun</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Sumber Data: Hasil Penelitian (2022)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah responden terbanyak berdasarkan jenis kelaminnya adalah berasal dari golongan jenis kelamin laki-laki yaitu 29 orang (58%), sedangkan perempuan berjumlah 21 orang (42%).

Sedangkan dari umur responden, yang paling banyak adalah yang berusia 20-25 tahun sebanyak 12 orang (24%), yang berusia 26-30 tahun sebanyak 32 orang (64%), yang

berusia 31 - 40 tahun sebanyak 5 orang (10%), dan yang berusia >40 tahun sebanyak 1 orang (2%).

### Demografi

Berikut ini akan disajikan hasil penelitian mengenai kondisi demografi dari responden yang telah berhasil dikumpulkan. Kondisi demografi ini mencakup: (1) status pendidikan dan (2) kondisi perekonomian.

Tabel 3 Kondisi Demografi: Status Pendidikan Responden

No	Status Pendidikan	Frequency	Percentage
1.	SD	16	32
2.	SLTP	20	40
3.	SLTA	8	16
4.	S1	6	12
5.	S2	0	0
<b>Sum</b>		<b>50</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data angket dan data Kelurahan, 2022.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar responden yang menjadi sampel penelitian, menurut demografi berdasarkan status pendidikan umumnya berasal dari status pendidikan formal SLTP, yakni sebanyak 20 orang (40%), sedangkan yang kedua adalah dari golongan pendidikan SD sebanyak 16 orang (32%).

Tabel 4 Kondisi Demografi: Kondisi Ekonomi

No	Kondisi Ekonomi	Frequency	Percentage
1.	Mampu	31	62
2.	Tidak Mampu	19	38
<b>Sum</b>		<b>50</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data angket dan data Kelurahan, 2022

Dari Tabel di atas dapat dikemukakan, bahwa dari data yang diperoleh kondisi ekonomi umumnya tergolong mampu, yaitu sebanyak 31 orang (62%), sedangkan kondisi ekonomi responden yang tidak mampu sebanyak 19 orang (38%). Mampu dan tidak mampu secara ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan gaya hidup masyarakat di rumahnya masing-masing.

### Tabulasi Data Hasil Kuesioner Respon Konsumen terhadap Wajib Pajak

Di bawah ini akan disajikan hasil dari penyebaran angket kepada responden mengenai respon terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas. Tabulasi Data menggunakan bantuan Software SPSS versi 27.

#### **Pertanyaan No.1: Keterlibatan Membayar Pajak**

Angka 4 berarti = Selalu

Angka 3 berarti = Jarang

Angka 2 berarti = Terkadang ditunda

Angka 1 berarti = Tidak pernah

**Tabel 5**

**Keterlibatan Membayar PBB**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	10	20.0	20.0	20.0
	3	12	24.0	24.0	44.0
	2	23	46.0	46.0	90.0
	1	5	10.0	10.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa kebanyakan responden mengatakan bahwa dalam membayar pajak “terkadang ditunda”, yaitu sebanyak 23 orang (46%), sedangkan yang selalu tepat waktu adalah 10 orang (20%), yang jarang membayar pajak sebanyak 12 orang (24%), dan yang tidak pernah membayar pajak sebanyak 5 orang (5%). Dengan demikian, data di atas menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pajak masih rendah.

**Pertanyaan No.2: Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak**

Angka 4 berarti = Selalu

Angka 3 berarti = Jarang

Angka 2 berarti = Terkadang ditunda

Angka 1 berarti = Tidak pernah

**Tabel 6**

**Ketepatan Waktu Pembayaran PBB**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	16	32.0	32.0	32.0
	3	27	54.0	54.0	86.0
	2	6	12.0	12.0	98.0
	1	1	2.0	2.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa kebanyakan responden mengatakan bahwa dalam masalah ketepatan membayar pajak “jarang dilakukan tepat waktu”, yaitu sebanyak 27 orang (54%), sedangkan yang selalu tepat waktu adalah 16 orang (32%), yang terkadang ditunda sebanyak 6 orang (12%), dan yang tidak pernah tepat waktu sebanyak 1 orang (2%). Data di atas pun memperkuat tentang kesadaran masyarakat terhadap pajak yang masih rendah.

**Pertanyaan No.3: Alasan Ketaatan Membayar Pajak**

Angka 4 berarti = Kewajiban

Angka 3 berarti = Tidak ingin ada masalah

Angka 2 berarti = Takut sama petugas

Angka 1 berarti = Takut sama sanksi

**Tabel 7**

**Alasan Ketaatan Membayar PBB**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	18	36.0	36.0	36.0
3	19	38.0	38.0	74.0
2	9	18.0	18.0	92.0
1	4	8.0	8.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa kebanyakan responden mengatakan bahwa alasan dalam membayar pajak PBB adalah karena “tidak ingin ada masalah”, yaitu sebanyak 19 orang (38%), sedangkan yang membayar karena ada kesadaran kewajiban sebagai masyarakat adalah 18 orang (36%), yang karena takut sama petugas sebanyak 9 orang (18%), dan yang takut sama sanksi sebanyak 4 orang (8%). Data di atas pun lebih memperkuat tentang kesadaran masyarakat terhadap pajak yang masih rendah.

***Pertanyaan No.4: Mengetahui Kegunaan Pajak***

- Angka 4 berarti = Sangat mengetahui
- Angka 3 berarti = Jarang mengetahui
- Angka 2 berarti = Tidak pernah mengetahui
- Angka 1 berarti = Tidak mau tahu

**Tabel 8**

**Mengetahui Kegunaan Pajak**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	24	48.0	48.0	48.0
3	20	40.0	40.0	88.0
2	6	12.0	12.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa sebetulnya masyarakat mengetahui mengenai kegunaan pajak, hal itu terlihat dari perolehan nilai kuesioner yang memilih sangat mengetahui sebanyak 24 orang (48%), sedangkan yang mengatakan jarang tidak cukup mengetahui sebanyak 20 orang (40%), yang mengatakan tidak pernah mengetahui sebanyak 6 orang (12%), dan tidak mau tahu adalah kosong.

***Pertanyaan No.5: Persepsi tentang Manfaat Pajak bagi Pembangunan***

- Angka 4 berarti = Sangat mengetahui
- Angka 3 berarti = Cukup mengetahui
- Angka 2 berarti = Tidak pernah mengetahui
- Angka 1 berarti = Tidak mau tahu

**Tabel 9**

**Persepsi tentang Manfaat Pajak**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	12	24.0	24.0	24.0
	3	23	46.0	46.0	70.0
	2	12	24.0	24.0	94.0
	1	3	6.0	6.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa pengetahuan masyarakat akan manfaat pajak bagi pembangunan wilayahnya cukup mengetahui, hal itu terlihat dari perolehan nilai kuesioner yang memilih cukup mengetahui sebanyak 23 orang (46%), sedangkan yang mengatakan sangat mengetahui sebanyak 12 orang (24%), yang mengatakan tidak pernah mengetahui sebanyak 12 orang (24%), dan yang tidak mau tahu adalah 3 orang (6%).

***Pertanyaan No.6: Pengetahuan Masyarakat tentang Otonomi Daerah***

- Angka 4 berarti = Sangat mengetahui
- Angka 3 berarti = Cukup mengetahui
- Angka 2 berarti = Tidak pernah mengetahui
- Angka 1 berarti = Tidak mau tahu

**Tabel 10**

**Pengetahuan tentang Otonomi Daerah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	12	24.0	24.0	24.0
	3	27	54.0	54.0	78.0
	2	8	16.0	16.0	94.0
	1	3	6.0	6.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa pengetahuan masyarakat akan otonomi daerah adalah cukup mengetahui, hal itu terlihat dari perolehan nilai kuesioner yang memilih cukup mengetahui sebanyak 27 orang (54%), sedangkan yang mengatakan sangat mengetahui sebanyak 12 orang (24%), yang mengatakan tidak pernah mengetahui sebanyak 8 orang (16%), dan yang tidak mau tahu adalah 3 orang (6%).

***Pertanyaan No.7: Otonomi Daerah dan Ketaatan Pembayaran Pajak***

- Angka 4 berarti = Sangat mengetahui
- Angka 3 berarti = Cukup mengetahui
- Angka 2 berarti = Tidak pernah mengetahui
- Angka 1 berarti = Tidak mau tahu

**Tabel 11****Pengetahuan Otonomi Daerah terhadap Ketaatan Pajak**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	12	24.0	24.0	24.0
	3	28	56.0	56.0	80.0
	2	7	14.0	14.0	94.0
	1	3	6.0	6.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa pengetahuan masyarakat akan otonomi daerah dan dampaknya terhadap ketaatan pajak adalah cukup mengetahui, hal itu terlihat dari perolehan nilai kuesioner yang memilih cukup mengetahui sebanyak 28 orang (56%), sedangkan yang mengatakan sangat mengetahui sebanyak 12 orang (24%), yang mengatakan tidak pernah mengetahui sebanyak 7 orang (14%), dan yang tidak mau tahu adalah 3 orang (6%).

**Pertanyaan No.8: Harapan Masyarakat setelah Membayar Pajak**

Angka 4 berarti = Kehidupan yang lebih baik

Angka 3 berarti = Sarana umum yang banyak dan layak

Angka 2 berarti = Menggugurkan kewajiban saja

Angka 1 berarti = Hanya ikut program pemerintah

**Tabel 12****Harapan Masyarakat dari Pajak**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	28	56.0	56.0	56.0
	3	13	26.0	26.0	82.0
	2	8	16.0	16.0	98.0
	1	1	2.0	2.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa harapan masyarakat terhadap pajak adalah sangat tinggi, hal itu terlihat dari perolehan nilai kuesioner yang memilih kehidupan yang lebih baik setelah mereka membayar pajak yaitu sebanyak 28 orang (56%), sedangkan yang mengatakan harapan adanya sarana umum yang lebih banyak dan layak sebanyak 13 orang (26%), yang mengatakan hanya menggugurkan kewajiban saja sebanyak 8 orang (16%), dan yang mengatakan hanya mengikuti program pemerintah adalah 1 orang (2%).

**Pertanyaan No.9: Pajak adalah Tugas Bersama**

Angka 4 berarti = Sangat mengetahui

Angka 3 berarti = Cukup mengetahui

Angka 2 berarti = Tidak pernah mengetahui

Angka 1 berarti = Tidak mau tahu



**Tabel 13**

**Tanggapan atas Konsep Pajak sebagai Kewajiban**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	19	38.0	38.0	38.0
3	22	44.0	44.0	82.0
2	8	16.0	16.0	98.0
1	1	2.0	2.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa persepsi atau konsepsi masyarakat terhadap pajak sebagai kewajiban adalah cukup mengetahui, hal itu terlihat dari perolehan nilai kuesioner yang memilih cukup mengetahui sebanyak 22 orang (44%), sedangkan yang mengatakan sangat mengetahui 19 orang (38%), yang mengatakan tidak pernah mengetahui sebanyak 8 orang (16%), dan yang mengatakan tidak mau tahu adalah 1 orang (2%).

**Pertanyaan No.10: Setuju dengan Otonomi Daerah**

Angka 4 berarti = Sangat setuju

Angka 3 berarti = Cukup setuju

Angka 2 berarti = Tidak setuju

Angka 1 berarti = Tidak mau tahu

**Tabel 14**

**Tanggapan atas Otonomi Daerah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	17	34.0	34.0	34.0
3	31	62.0	62.0	96.0
2	2	4.0	4.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Angket Penelitian, 2022.

Sesuai Tabel di atas terlihat bahwa tanggapan masyarakat terhadap otonomi daerah adalah cukup setuju, hal itu terlihat dari perolehan nilai kuesioner yang memilih cukup setuju sebanyak 31 orang (62%), sedangkan yang mengatakan sangat setuju 17 orang (34%), dan yang mengatakan tidak setuju sebanyak 2 orang (4%).

**Analisis Respon Masyarakat terhadap Wajib Pajak PBB**

Setelah dilakukan tabulasi data dalam bentuk tabel frekuensi, maka berikutnya adalah melakukan kesimpulan terhadap keseluruhan hasil kuesioner untuk menentukan apakah respon masyarakat terhadap wajib pajak adalah rendah, cukup ataukah tinggi dengan penghitungan jumlah kelas dan interval kelas.

Perhitungan jumlah kelas digunakan sebagai alat bantu untuk menyajikan data,

khususnya untuk mengetahui penilaian tentang respon keseluruhan dari masyarakat terhadap wajib pajak PBB. Perhitungan ini menentukan berapa kelas penilaian yang akan digunakan. Untuk perhitungan jumlah kelas digunakan rumus:

$$\text{Jumlah kelas} = 1 + 3,322 \log n \quad (n = \text{jumlah sampel})$$

Sedangkan perhitungan interval kelas digunakan untuk menghitung interval penilaian dari setiap kelas. Jika telah diketahui interval kelasnya, maka akan mudah di dalam menentukan batas interval dari setiap kelas penilaian. Untuk perhitungan interval kelas digunakan rumus:

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Keterangan:

Skor tertinggi : Nilai tertinggi dari data yang ada (lihat Tabel 15)

Skor terendah : Nilai terendah dari data yang ada (lihat Tabel 15)

Dalam penelitian ini, jumlah kelas dan interval kelas adalah:

$$\begin{aligned} \text{a. Jumlah kelas} &= 1 + 3,322 \log n \\ &= 1 + 3,322 \log 50 \\ &= 1 + 3,322 (1.69) \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah kelas} = 5 \text{ (dibulatkan)}$$

$$\text{b. Interval kelas} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{3.7 - 2.1}{5} \\ &= 1.6 / 5 \end{aligned}$$

$$\text{Interval kelas} = 0.3$$

Sehingga diperoleh batas interval:

2.1 – 2.4	= Sangat Rendah	(Kelas I)
2.5 – 2.8	= Rendah	(Kelas II)
2.9 – 3.2	= Sedang	(Kelas III)
3.3 – 3.6	= Tinggi	(Kelas IV)
3.7 – 4.0	= Sangat Tinggi	(Kelas V)

Kemudian, data primer variabel Respon Masyarakat terhadap Wajib Pajak PBB yang berhasil dikumpulkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 15**

**HASIL KUESIONER RESPON MASYARAKAT  
TERHADAP WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
KELURAHAN TIMBANG DELI KECAMATAN MEDAN AMPLAS**

RESPONDEN	Pertanyaan Kuesioner										JUMLAH	RATA2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2	26	2.6
2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	25	2.5
3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	4	26	2.6
4	3	4	4	4	2	3	3	3	3	2	31	3.1
5	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	25	2.5
6	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	2.9
7	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3	29	2.9
8	2	3	3	3	2	3	3	3	4	4	30	3
9	4	3	2	3	2	3	3	4	4	4	32	3.2
10	2	3	2	3	3	3	3	4	3	3	29	2.9
11	3	3	2	2	2	3	3	4	4	4	30	3
12	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	33	3.3
13	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	35	3.5
14	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	29	2.9
15	2	4	4	2	3	2	3	4	4	4	32	3.2
16	2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	35	3.5
17	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	34	3.4
18	2	3	3	4	3	3	3	4	3	4	32	3.2
19	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	36	3.6
20	2	4	4	4	3	3	3	3	4	4	34	3.4
21	2	4	4	4	4	3	3	3	4	3	34	3.4
22	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	34	3.4
23	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	34	3.4
24	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	35	3.5
25	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	31	3.1
26	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	34	3.4
27	2	3	4	4	4	3	4	4	3	4	35	3.5
28	1	3	4	4	4	3	4	4	4	3	34	3.4
29	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	34	3.4
30	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	33	3.3
31	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	37	3.7
32	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	35	3.5
33	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	31	3.1
34	1	4	3	3	3	4	4	4	4	3	33	3.3

35	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	34	3.4
36	2	4	4	4	3	3	3	4	3	3	33	3.3
37	2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	36	3.6
38	2	4	1	3	3	4	3	3	3	3	29	2.9
39	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	34	3.4
40	4	3	3	4	2	2	3	3	3	3	30	3
41	2	2	2	4	2	2	2	4	4	3	27	2.7
42	1	3	3	4	2	2	2	1	3	3	24	2.4
43	4	4	3	3	1	1	1	4	4	4	29	2.9
44	2	4	1	2	1	2	2	2	4	3	23	2.3
45	2	4	4	4	1	1	1	2	2	4	25	2.5
46	1	1	1	3	2	2	2	4	4	3	23	2.3
47	2	3	1	3	2	2	2	2	1	3	21	2.1
48	1	4	4	4	2	1	1	2	4	3	26	2.6
49	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	28	2.8
50	2	2	4	4	2	2	2	4	4	3	29	2.9

Sumber: Data kuesioner (2022)

Adapun penyajian hasil penilai variabel Respon Masyarakat terhadap wajib Pajak PBB pada Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas dari data di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 16  
HASIL RESPON MASYARAKAT TERHADAP WAJIB PAJAK PBB  
PADA KELURAHAN TIMBANG DELI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

No.	Hasil dari Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1.	Sangat Rendah(2.1 - 2.4)	4	8
2.	Rendah (2.5 - 2.8)	8	16
3.	Sedang (2.9 - 3.2)	16	32
4.	Tinggi (3.3 - 3.6)	21	42
5.	Sangat Tinggi (3.7 - 4.0)	1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner 2022)

Berdasarkan data mengenai seluruh jawaban responden terhadap respon masyarakat terhadap wajib pajak PBB era otonomi daerah pada Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas untuk responden saat ini, ternyata dari 50 orang yang diteliti: 4 orang (8%) merespon sangat rendah, 8 orang (16%) yang merespon rendah, 16 orang (32%) yang merespon biasa-biasa saja, 21 orang (42%) yang merespon tinggi, dan 1 orang (2%) yang merespon sangat tinggi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan respon masyarakat terhadap wajib pajak PBB era otonomi daerah pada Kelurahan Timbang Deli

Kecamatan Medan Amplas berdasarkan responden saat ini adalah “tinggi”. Meskipun demikian, masih ada kesenjangan antara nilai total respon masyarakat dengan hasil masing-masing kuesioner, khususnya berkaitan dengan keterlibatan membayar pajak PBB dan ketepatan waktu pembayaran. Hal itu menunjukkan bahwa respon masyarakat yang tinggi tidak berjalan searah dengan keterlibatan mereka dan ketepatan waktu pembayaran PBB mereka. Artinya, respon yang tinggi tidak diikuti oleh kesadaran pajak yang tinggi pula.

### **Saran**

Untuk itu, perlu diadakan upaya peningkatan dalam usaha penyadaran terhadap kewajiban pajak pada masyarakat Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sugiyono. (2013: 11). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal.27 dan hal.29
- Alma, Buchori. 2000. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Bandung: Rineka Cipta.
- Barata, Atep Adya. 1986. Pajak Bumi dan Bangunan, Bandung: Karya Nusantara.
- Effendi, Onong U. 1998. Pengantar Ilmu Komunikasi, Bandung: Rosda Karya.
- Gie, The Liang. 2003. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Gunung Agung.
- Elazhari, 2019. Policy In the development of social development in society: Study of implementation of regional regulation number 4 of 2008 concerning handling of homeless and beggar in the ...
- Muhammad Rajali, Elazhari, Khairuddin Tampubolon, (2021). Pencocokan Kurva Dengan Metode Kuadrat Terkecil dan Metode Gauss. AFOSJ-LAS: Journal All Field of Science J-LAS, 1(1), 14-22.  
From: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS/article/view/9>
- Khairuddin Tampubolon, & Koto, F. R. (2019). Analisis Perbandingan Efisiensi Kerja Mesin Bensin Pada Mobil Tahun 2000 Sampai Tahun 2005 Dan Mobil Tahun 2018 Serta Pengaruh Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Dan Cara Perawatannya Sebagai Rekomendasi Bagi Konsumen. Jmemme: Journal Of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials And Energy, 3(2), 76-83.  
From <Http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Jmemme/Article/View/2773>
- Wispi Elbar, Khairuddin Tampubolon, (2020), Pengaruh Campuran Silikon Pada Aluminium Terhadap Kekerasan Dan Tingkat Keausannya, Jmemme: Journal Of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials And Energy, 4(2), 183-196.  
From: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jmemme/article/view/4070>
- Khairuddin Tampubolon, Fider Lumbanbatu (2020), Analisis Penggunaan Knalpot Berbahan Komposit Untuk Mengurangi Tingkat Kebisingan Pada Motor Suzuki Satria, Jmemme: Journal Of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials And Energy, 4(2), 174-182.  
From: <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jmemme/article/view/4065>
- Roswirman Roswirman, ELAZHARI, Khairuddin Tampubolon(2021) Pengaruh Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru

- pada Era New Normal di SMK Swasta PAB 2 Helvetia; AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS),V.1,no.4,2021 (hal.316-333).
- Elazhari, 2021. Pengaruh Motivasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 2 Tanjung Balai, AFoSJ-LAS: Journal All Field of Science J-LAS, 1(1), 44-53. From: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS/article/view/7>
- Henry, Nicholas. 1999. Administrasi negara dan masalah-masalah publik, diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kotler, Philip. 2001. Marketing, Jakarta: Erlangga.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. Psikologi Komunikasi, Bandung: Rosda Karya.
- Sarundajang, 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri. 1999. Perpajakan Umum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, 2005. Metode Statistika, Bandung: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2000. Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, Cet.Ke-3.
- Sugiyono, 2005. Statitiska untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar administrasi pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Zauhar, Soesilo. 2000. Reformasi administrasi: konsep, dimensi dan strategi. Jakarta: Bumi Aksara.